

## DAFTAR PUSTAKA

- (DJP), D. J. (2017). *Mengelola Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Serial Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah 2017*. Jakarta: Yayasan Penabulu.
- (IFAC), A. I. (2014). *IFAC handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*. Switzerland: IFAC Publications.
- Ahmad, N. F. (2015). Investigating The Factors Influencing Users Resistance Toward Accrual Accounting . *Procedia Economic and Finance*.
- Anvig, J. O.-H. (2001). *Corruption. A Review of Contemporary Research*. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R.
- Arifin, M. A. (2017). Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Government Governance. *Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol.13, No 4*.
- Asfiah. (2016). *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, 70-79*.
- Asfiah. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Anuntaloko Kabupaten Parigi Mautong. *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, 70-81*.
- Asfiansyah, A. (2015). Strategi Implementasi Akuntansi Akrua Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota "S"). *Jurnal Neo-Bis, 1-19*.
- Astuti, Y. L. (2017). *Skripsi*. Retrieved 2017, from Digital Repository Perpustakaan IAIN Surakarta: <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/872/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, (. (2020). Retrieved from Situs Resmi BPKP : <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>
- Burrowes, A. (2011). Accountability in Public Sector. *Chartered Accountant Journal Vol 90 No1*.
- Cristensen, M. (2002). Accrual Accounting In The Public Sector: The Case Of The New South Sales Wales Government. *Accounting History Vol 7*.
- Dhiyavani, S. I. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi Standar

- Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Government Governance. *JOM Fekon 4 (1)*, 1859-1872.
- Efanita, W. V. (2013). *Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Buton*. Kendari: Jurusan Akuntansi Universitas Halu Oleo.
- Eisenhardt. (1989). Agency theory; an assessment and review. *Academy of Management Review*, 57-74.
- Halim, A dan Syukriy, A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 53-64.
- Halim, A. a. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Indriantoro Nur dan Supomo Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana, Voll, No 1*, 1-14.
- Jensen, M. a. (1976). Theory of Firm: Managerial Behavior Agency Cost , and Owner Ship Structure. *Journal of Finance Economic Vol 3*, 305-360.
- Kementrian Keuangan, R. I. (2014). *Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis AkruaI*. Jakarta.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika-Bisnis, Vol. 02 No. 02* , 357- 370.
- Kieso, D. E. (2014). *Intermediate Accounting; IFRS Edition. Second Edition*. New York: John Wiley & Sons.
- Komite Nasional. (2008). *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rianeka Cipta.
- Kusuma M., I. Y. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah. *Journal Accounting Reasearch*, 1-14.

- Lamonisi, S. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Kota Tomohon. *Jurnal EMBA 223 Vol.4 No.1* , 223-230.
- Liekerman. (2003). Planning and controlling UK public expenditure on a resources basis . *Journal Public Money and Management*, 45-50.
- Liestyodono dan Ridho. (2018). Analisis Kinerja Pelayanan Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang). *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 360-390.
- Makara0, N. R. (2017). Implementasi PPK-BLUD Puskesmas (Studi Kasus di UPTD Pelayanan Kesehatan Ketapang). *Jurnal Inspirasi Volume 8 No. 1*, 25-36.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Monasoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No 1*.
- Novitasari. (2014). Adopsi Accrual Accounting Pada Pemerintahan Republik. *Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 5 No. 2*, 218-219.
- Nubatonis.E. Sondil, d. (2014). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol, No1*.
- Organization for Economic Cooperation and Development, (OECD). (2004). *Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publisher.
- Pawan Adhikari, a. L.-N. (2016). Implementing Public Sector Accruals in OECD member states: Major Issues and Challenges . *Accounting Forum*.
- Pratiwi, D. (2011). *Hubungan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi*. Bogor: Universitas Gunadharma.
- Putri Dwi febria, Y. Y. (2019). Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1*, 131-142.
- Rachmawati, A. D. (2018). Studi Fenomenologi Atas Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Saiful Anwar Malang. *Jurnal Akuntansi AkruaI Vol5, No 2*, 121-128.

- Rizki Arvi Yunita, S. K. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal Sebagai Implementasi PP 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*.
- Sangki, A. A. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Journal Eksekutif Vol 1 No 1*.
- Shanti, Y. K. (2018). Analisis Penerapan Basis Akruwal Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 dan Dampaknya Pada penyajian Laporan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol 1, No 1*.
- Simanjuntak. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal di Sektor Pemerintahan di Indonesia. *Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Yeni Priatna Sari, H. N. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Akruwal; Studi Kasus di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kota Tegal. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1, 18-28*.
- Zanin, L. a. (2013). IPSAS and local government consolidated financial statements—proposal for a territorial consolidation method. *Public Money & Management*, 429-436 .
- Zarkasyi, M. (2008). *Good Corporate Governance (Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya)*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 Jc PP No 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal No 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 220/PMK.05 Tahun 2016 Jc PMK RI Nomor 42/PMK.05/2017 Tentang Sistem dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2016 Tentang PK- BLUD Puskesmas Kota Dumai

Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pada BLUD Puskesmas Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Dumai

